

Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia Mencegah Konflik Politik Menuju Persatuan Indonesia di Era Digital

M Zebin Ardhani¹ Diki Wilda Rinta² Ivan Adhitheo Prayoga³ Linda Amani Sujana⁴
Muhammad Farzani⁵

Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bandar Lampung

Alamat : Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35142

Abstract. *In the rapidly developing digital era, the concept of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) has an increasingly important role in preventing political conflict and strengthening national unity. As a country consisting of various tribes, religions, cultures and diverse backgrounds, Indonesia is faced with great challenges in maintaining its integrity and stability. Political conflict is one of the threats that can threaten national unity and integrity, especially in a digital context which allows information to spread quickly and widely without geographical boundaries. In the complexity of current political dynamics, the concept of the Republic of Indonesia is not just an empty slogan, but a real guideline in maintaining the unity and integrity of the nation. By building collective awareness of the importance of unity, Indonesia can face the challenges of the digital era more firmly. The aim of this scientific article is to explain the role of the concept of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) in preventing political conflict in the digital era and to analyze the challenges and threats faced in maintaining the unity of the Indonesian nation amidst the dynamics of the digital era.*

Keywords : *Digital Era, National Unity and Political Conflict*

Abstrak. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki peran yang semakin penting dalam mencegah konflik politik dan memperkokoh persatuan bangsa. Sebagai sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang yang beragam, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga keutuhan dan stabilitasnya. Konflik politik menjadi salah satu ancaman yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam konteks digital yang memungkinkan informasi tersebar dengan cepat dan luas tanpa batas geografis. Dalam kompleksitas dinamika politik saat ini, konsep NKRI tidak hanya menjadi semboyan kosong, melainkan sebuah pedoman yang nyata dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Dengan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan, Indonesia dapat menghadapi tantangan era digital dengan lebih kokoh. Tujuan dari artikel ilmiah ini adalah untuk menjelaskan peran konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam mencegah konflik politik di era digital serta menganalisis tantangan dan ancaman yang dihadapi dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia di tengah dinamika era digital.

Kata Kunci : Era Digital, Konflik Politik dan Persatuan Bangsa

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki peran yang semakin penting dalam mencegah konflik politik dan memperkokoh persatuan bangsa. Sebagai sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang yang beragam, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga keutuhan dan stabilitasnya. Konflik politik menjadi salah satu ancaman yang

dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam konteks digital yang memungkinkan informasi tersebar dengan cepat dan luas tanpa batas geografis. Konsep NKRI yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia merupakan landasan utama dalam membangun kesatuan dan persatuan. Konsep ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda namun tetap satu), Pancasila sebagai dasar negara, serta semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang menggarisbawahi keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Dalam konteks digital, konsep ini menjadi penyangga utama dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang muncul akibat arus informasi yang tidak terkendali.

Pentingnya konsep NKRI dalam mencegah konflik politik di era digital dapat dilihat dari upaya pemerintah dan berbagai pihak dalam mempromosikan kesadaran akan nilai-nilai persatuan dan kebhinekaan. Melalui pendidikan yang inklusif dan edukasi digital yang menyeluruh, masyarakat diajarkan untuk menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi toleransi. Selain itu, regulasi dan kebijakan yang memperkuat persatuan juga diperlukan, baik dalam ranah hukum maupun dalam pengembangan infrastruktur digital yang aman dan terpercaya. Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, pentingnya konsep NKRI sebagai pilar utama dalam mencegah konflik politik tidak boleh diabaikan. Dengan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan dan menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan, Indonesia dapat menjaga stabilitas politiknya dan menghadapi tantangan era digital dengan lebih kokoh. Dengan demikian, konsep NKRI bukan hanya menjadi semboyan kosong, melainkan sebuah panduan yang nyata dalam menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa Indonesia di tengah arus informasi yang terus berkembang.

Dalam menghadapi tantangan era digital, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memainkan peran yang semakin vital dalam mencegah konflik politik serta memperkuat persatuan bangsa. Era digital membawa perubahan besar dalam dinamika politik, di mana informasi dapat tersebar dengan cepat dan luas tanpa batas geografis, menciptakan ruang bagi penyebaran pandangan yang beragam serta potensi konflik yang lebih besar. Dalam konteks ini, NKRI menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas politik dan sosial bangsa Indonesia. Konsep NKRI mencakup nilai-nilai dasar yang memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, serta semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" menjadi pijakan moral dan filosofis dalam memahami keberagaman sebagai kekayaan dan kekuatan bangsa. Namun, dalam era digital, keberagaman ini juga menjadi titik sensitif yang dapat dimanfaatkan untuk memecah belah bangsa jika tidak dikelola dengan baik.

Pentingnya konsep NKRI dalam mencegah konflik politik di era digital tergambar dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak. Salah satunya

adalah melalui pendidikan yang inklusif, yang tidak hanya mengajarkan materi akademik, tetapi juga nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan menghargai perbedaan. Edukasi digital juga menjadi bagian penting dalam menyadarkan masyarakat akan bahaya dan dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak benar atau provokatif. Regulasi dan kebijakan yang mendukung persatuan juga menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas politik di era digital. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat tetap menjadi prinsip utama, namun dengan batasan yang jelas untuk mencegah penyebaran konten yang menghasut atau memicu konflik. Pengembangan infrastruktur digital yang aman dan terpercaya juga menjadi prioritas dalam menjaga keamanan informasi dan data pribadi masyarakat.

Dalam kompleksitas dinamika politik saat ini, konsep NKRI tidak hanya menjadi semboyan kosong, melainkan sebuah pedoman yang nyata dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Dengan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan, Indonesia dapat menghadapi tantangan era digital dengan lebih kokoh. Melalui langkah-langkah konkret dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan, regulasi yang memperkuat persatuan, dan edukasi digital yang holistik, NKRI tetap menjadi penyangga utama dalam menghadapi dinamika politik di era digital yang terus berkembang.

Dalam melangkah menuju persatuan di era digital, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memainkan peran yang semakin penting dalam mencegah konflik politik dan memperkuat persatuan bangsa. Era digital membawa perubahan yang cepat dan mendalam dalam lanskap politik, di mana arus informasi yang tidak terkendali dapat menjadi medan subur bagi polarisasi dan konflik. Dalam konteks ini, NKRI menjadi landasan kuat yang mampu membendung gelombang potensi perpecahan dan menjaga keutuhan bangsa. NKRI, dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", memberikan landasan moral dan filosofis yang kokoh dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman yang kaya. Namun, tantangan muncul ketika keberagaman ini diekspos dalam ruang digital yang terbuka, di mana pandangan yang berbeda dapat dengan mudah dikotak-kotakkan dan diperdebatkan tanpa batas.

Pentingnya konsep NKRI dalam mencegah konflik politik di era digital tercermin dalam upaya-upaya konkret yang dilakukan. Pendidikan yang inklusif menjadi kunci untuk menyadarkan generasi muda akan pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan. Selain itu, pengawasan terhadap penyebaran informasi yang provokatif dan hoaks harus diperketat melalui regulasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks, NKRI bukan sekadar semboyan kosong, melainkan sebuah komitmen yang nyata dalam membangun persatuan dan kesatuan. Dengan memperkuat nilai-nilai

kebangsaan melalui edukasi dan regulasi yang tepat, serta membangun kesadaran akan pentingnya persatuan di era digital, Indonesia dapat menghadapi tantangan masa depan dengan lebih kokoh dan bersama-sama.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dari artikel ini adalah : Bagaimana konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat menjelma menjadi penyangga utama dalam mencegah konflik politik di tengah dinamika era digital?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan deskriptif yang cenderung menggunakan analisis. Pendekatan kualitatif lebih fokus pada proses dan makna. Landasan teori yang menjadi pedoman untuk memastikan fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Saat ini metode kualitatif menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi masyarakat kelompok terhadap sesuatu. Oleh karena itu proses penelitian kualitatif diawali dengan asumsi-asumsi dasar dan kaidah berfikir yang akan digunakan dalam artikel.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian kemudian akan di interprestasikan. Metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antar penelitian dengan fenomena yang diteliti. Metode penelitian ini menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang di teliti. Fokus utama metode penelitian ini adalah menjelaskan objek penelitian. Sehingga menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang terjadi. Metode ini cenderung lenih memfokuskan pada pembahasan kenapa suatu peristiwa atau fenomena terjadi, Dimana peristiwa dan fenomena yang dimaksud adalah objek penelitian.

Sumber Informan

No.	Nama	Umur
1.	Audrey	20 Tahun
2.	Saffa	22 Tahun
3.	Fadel	20 Tahun
4.	Abidzar	21 Tahun

5.	Zibril	19 Tahun
----	--------	----------

Pembahasan

Teori pluralisme adalah kerangka konseptual dalam ilmu politik dan sosiologi yang menekankan pentingnya mengakui dan menghargai keberagaman dalam masyarakat sebagai sumber kekuatan. Konsep ini mengajarkan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan, nilai, dan identitas yang berbeda-beda, dan bahwa keberagaman ini seharusnya dianggap sebagai aset yang memperkaya, bukan sebagai sumber konflik. Dalam konteks politik, teori pluralisme menunjukkan bahwa dalam sebuah masyarakat yang demokratis, berbagai kelompok memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan berekspresi atas pandangan dan kepentingan mereka. Pluralisme politik menekankan pentingnya persaingan yang sehat antara berbagai kelompok dan pandangan politik yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kompromi yang menguntungkan semua pihak.

Dalam konteks Indonesia, konsep Bhinneka Tunggal Ika atau "Berbeda-beda namun tetap satu" adalah manifestasi dari prinsip pluralisme. Indonesia sebagai negara dengan beragam suku, agama, budaya, dan bahasa, mengadopsi pluralisme sebagai landasan filosofis untuk membangun persatuan dalam keberagaman. Prinsip ini menekankan bahwa meskipun masyarakat Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan yang signifikan, mereka tetap satu dalam semangat persatuan sebagai bangsa Indonesia. Dalam menerapkan teori pluralisme dalam konteks NKRI, penting untuk mempromosikan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan inklusi sosial yang luas. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang inklusif, kebijakan publik yang mendukung keberagaman, dan pembangunan dialog antarkelompok yang memperkuat persatuan bangsa. Dengan memahami dan menerapkan konsep pluralisme, masyarakat Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat untuk mencegah konflik politik dan memperkuat persatuan di era digital yang terus berkembang.

Teori pluralisme merupakan suatu pendekatan yang mendasarkan pada pengakuan dan penerimaan terhadap keberagaman dalam masyarakat sebagai kekuatan yang memperkaya. Dalam konteks politik dan sosial, pluralisme menegaskan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok dengan kepentingan, nilai, dan identitas yang berbeda-beda, dan bahwa keberagaman ini seharusnya dihargai dan diperjuangkan sebagai aspek yang positif dan memperkaya. Dalam politik, teori pluralisme menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif dari berbagai kelompok dalam proses pengambilan keputusan politik, tanpa adanya dominasi

satu kelompok atau pandangan tertentu. Pluralisme politik menekankan perlunya adanya persaingan ide dan pandangan yang sehat antara berbagai kelompok dalam masyarakat untuk mencapai kesepakatan atau kompromi yang menguntungkan semua pihak.

Dalam konteks Indonesia, prinsip Bhinneka Tunggal Ika atau "Berbeda-beda namun tetap satu" merupakan manifestasi dari konsep pluralisme. Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, mengadopsi pluralisme sebagai landasan filosofis untuk membangun persatuan dalam keberagaman. Prinsip ini menegaskan bahwa meskipun masyarakat Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan, mereka tetap satu dalam semangat persatuan sebagai bangsa Indonesia. Dalam praktiknya, penerapan teori pluralisme dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melibatkan upaya untuk mempromosikan toleransi, dialog antarkelompok yang konstruktif, serta pengakuan terhadap hak-hak dan kepentingan semua kelompok dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang inklusif, kebijakan publik yang mendukung keberagaman, serta pembangunan ruang-ruang partisipasi yang memungkinkan semua suara didengar dan dihargai.

Dengan demikian, penerapan konsep pluralisme dalam NKRI tidak hanya memperkuat persatuan dalam keberagaman, tetapi juga membantu masyarakat untuk mencegah konflik politik dan membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan bersama dalam era digital yang terus berkembang.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945, NKRI adalah bentuk negara yang menegaskan persatuan dan kesatuan seluruh wilayah serta rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Prinsip ini dirancang oleh para pendiri bangsa untuk memastikan bahwa Indonesia tetap utuh dan bersatu di tengah keberagaman yang ada. NKRI memainkan peran penting dalam mencegah konflik politik. Dalam sistem negara kesatuan, kebijakan nasional diberlakukan secara seragam di seluruh wilayah, yang membantu mencegah fragmentasi regional dan separatisme. Pemerintah pusat memiliki kendali penuh untuk menerapkan kebijakan yang merata, yang dapat mengurangi potensi konflik antar daerah dan memastikan pemerataan pembangunan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah munculnya gerakan-gerakan yang dapat mengancam integritas bangsa. Namun, tantangan di era digital tidak dapat diabaikan. Di zaman sekarang, informasi menyebar dengan cepat dan luas melalui internet dan media sosial. Sementara hal ini membawa manfaat besar, seperti akses informasi yang lebih mudah dan cepat, juga membawa risiko berupa penyebaran misinformasi dan disinformasi. Informasi palsu atau provokatif yang tersebar di dunia maya dapat memicu konflik politik, memperburuk sentimen negatif antar kelompok, dan bahkan mengarah pada kekerasan. Untuk mengatasi tantangan ini, peran pemerintah dan masyarakat

dalam menjaga kesatuan NKRI semakin krusial. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap konten digital yang dapat memecah belah. Selain itu, pendidikan literasi digital harus ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Kampanye dan program yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan persatuan melalui media digital juga penting untuk dilakukan. Melalui upaya bersama ini, diharapkan persatuan Indonesia dapat terus terjaga meskipun berada di tengah arus digital yang cepat dan dinamis. Dengan demikian, konsep NKRI tetap relevan dan vital dalam menghadapi tantangan era digital. Melalui penerapan kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat, konflik politik dapat diminimalisir dan persatuan bangsa Indonesia dapat dipertahankan. Perpaduan antara teknologi digital dan nilai-nilai kebangsaan yang kuat akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI di masa depan.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menjaga persatuan di era digital. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan algoritma yang bisa mendeteksi dan mengurangi penyebaran konten berbahaya. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam mengedukasi publik dan membangun jejaring yang memperkuat solidaritas nasional.

Di era digital, penguatan identitas nasional harus dilakukan dengan pendekatan yang inovatif. Penggunaan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan dan cerita-cerita inspiratif tentang keragaman dan persatuan Indonesia dapat menjadi strategi efektif. Pemerintah dan masyarakat perlu memanfaatkan teknologi untuk membangun narasi positif yang menguatkan identitas nasional dan membangun solidaritas antar kelompok.

NKRI menggarisbawahi prinsip persatuan, kesatuan, dan keberagaman sebagai landasan utama bagi keberlangsungan negara Indonesia. Dalam konteks era digital, di mana arus informasi sangat cepat dan mudah tersebar, tantangan terhadap persatuan bangsa semakin kompleks. Oleh karena itu, artikel tersebut menyoroti peran penting konsep NKRI dalam menghadapi tantangan tersebut dengan memperkuat nilai-nilai persatuan, menjaga keberagaman, dan meningkatkan inklusi sosial di tengah dinamika perkembangan teknologi dan informasi. Dengan demikian, konsep NKRI bukan hanya sebagai fondasi hukum negara, tetapi juga sebagai prinsip yang mampu memitigasi konflik politik dan memperkokoh persatuan bangsa dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin digital ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia Mencegah Konflik Politik Menuju Persatuan Indonesia Di Era Digital di kelurahan sumur batu. Lokasi yang diambil untuk penelitian ini adalah Ibu Rumah Tangga di Lingkungan Kelurahan Sumur Batu, Bandar Lampung. Dimana dalam penelitian ini , peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia Mencegah Konflik Politik Menuju Persatuan Indonesia Di Era Digital.

Oleh karena itu, jika menganalisis tentang penguatan resolusi konflik di era digital sebagai perwujudan warga negara yang baik, dalam konteks perkembangan teknologi tentu saja akan terkait dengan mempercepat penyebaran informasi, polarisasi, dan memberi ruang bagi konflik yang lebih kompleks. Penting untuk mengeksplorasi dan memahami resolusi konflik di era digital agar dapat menangani tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam memperkuat integrasi nasional.

Berikut ini adalah saran yang diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan :

1. Diharapkan peneliti lain yang meneliti mengenai Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia Mencegah Konflik Politik Menuju Persatuan Indonesia Di Era Digital dapat menggali lebih dalam lagi
2. Diharapkan kepada generasi muda tepatnya di kelurahan sumur batu untuk dapat tidak melupakan nilai nilai NKRI seiring berkembangnya zaman

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. (2016). Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 37–50.
- Amalia, F. R., & Najicha, F. U. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengatasi Luntarnya Nilai Nasionalisme Dan Cinta Nkri Di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1–8.
- Ansani, Abubakar, A., & Muhsin Mahfudz. (2021). Implementasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Quran Di Era Society 5.0. *JCI: Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 395–408.
- Ardiansyah, D., & Ulum, M. M. (2023). Aktualisasi Nilai Tasamuh Dalam Pondok Pesantren Sebagai Upaya Merawat Kebhinekaan di Era Society 5.0. *Excelencia Journal of Islamic Education & Management*, 3(2), 261–274.

- Hasan, Zainudin, Hamaminata Gata, Cahyono Riki, Guntur Muhammad, Dan Bandarsyah Fahrozi Nanang ‘Peran Pancasila Dan Bhinneka Tunggal Ika Dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik Identitas ’, 2,4 2024, 57 - 69
- Hasan, Zainudin, Iqbal Muhammad, Dan Ardie Juli Heru, ‘Analisis Hukum Dalam Melacak Jejak Digital Dan Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Era Teknologi’, 2.1 (2024), 286–298
- Hasan, Zainudin, Pradhana Fadhil Rachmat, Andika Pratama Agel, dan Al Jabbar Dzaky Ronald Muhammad, ‘Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal Dan Pancasila’, 1.1-6 (2024),
- Wahyuddin, W. (2016). Kontribusi Pondok Pesantren terhadap NKRI. *Jurnal Kajian Keislaman*, 3(1), 42.
- Wigena, N. R., Dzar Alghifari, M., Rosiana Kamilah, N., Nurhalimah, H., & Gustian Nugraha, R. (2022). Pengaruh Era Society 5.0 Terhadap Nilai-Nilai Pancasila Yang Menjadi Tantangan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1982–1986.